

DAFTAR PRODUK HUKUM BERKAITAN DENGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Produk Hukum	Keterangan
1	140/KEP/2020 Keputusan Gubernur Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140/KEP/2020 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Kelautan Dan perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020	02-06-2020 Berlaku
2	33/KEP/2020 Keputusan Gubernur Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KEP/2020 Tentang Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan Dan perikanan Tahun Anggaran 2020	21-01-2020 Berlaku
3	301/KEP/2019 Keputusan Gubernur Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi Pada Dinas Kelautan Dan perikanan Tahun Anggaran 2020	16-12-2019 Berlaku
4	38/SEKDA/VIII/2019 Keputusan Sekda Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Terkena Bencana Alam Di Kawasan Tempat Pelelangan Ikan Ngrehenan Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul Dari Daftar Barang Dinas Kelautan Dan perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta	01-08-2019 Berlaku
5	13 Tahun 2019 Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Kelautan Dan perikanan	22-02-2019 Berlaku
6	97 Tahun 2018 Peraturan Gubernur Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan Dan perikanan Mencabut : • 93 Tahun 2015	15-10-2018 Berlaku, Mencabut
7	61 Tahun 2018 Peraturan Gubernur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan perikanan Mencabut : • 66 Tahun 2015	02-10-2018 Berlaku, Mencabut
8	29/IZ/2018 Ijin Gubernur Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Desa Sendangadi Kepada Saudara Drh. Wagimin Untuk Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi, Pertanian, Peternakan, perikanan, Dan Outbond Training	12-03-2018 Berlaku
9	19/IZ/2018 Ijin Gubernur Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo Menggunakan Tanah Desa Tanjungharjo Untuk Pembangunan Pusat Pemasaran Dan Promosi Hasil perikanan Dengan Sistem Bangun Serah Guna Bekerja Sama Dengan Dinas Kelautan perikanan Dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo	06-02-2018 Berlaku
10	11 Tahun 2010 Peraturan Daerah	29-11-2010 Berlaku, Mengubah

No.	Produk Hukum	Keterangan
	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Usaha perikanan Dan Usaha Kelautan Mengubah : • 6 Tahun 2005	
11	7 Tahun 2005 Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelabuhan perikanan Pantai (PPP) Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	22-11-2005 Berlaku
12	6 Tahun 2005 Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Usaha perikanan Dan Usaha Kelautan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Diubah oleh : • 11 Tahun 2010	22-11-2005 Berlaku, Diubah
13	1 Tahun 1997 Peraturan Daerah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bidang perikanan, Sosial, Ketenagakerjaan, Perkebunan, Keprawisataan, Pekerjaan Umum, Pertambangan dan LLAJ Kepada Kotamadya DATI II Yogyakarta dan Kabupaten DATI II Bantul	30-11--0001 Berlaku
14	423/KEP/2012 Keputusan Gubernur Pengangkatan pejabat pengelola kegiatan dekonsentrasi Pada Dinas Kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2013	27 Desember 2012 Berlaku
15	398/KEP/2015 Keputusan Gubernur Perubahan Kedua Atas keputsan Gubernur daerah istimewa Yogyakarta No.267/KEP/2009 tentang Status penggunaan barang Milik daerah pada Dinas kelautan dan perikanan Provinsi daerah istimewa yogyakarta	31 Desember 2015 Berlaku
16	391/KEP/2018 Keputusan Gubernur Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi Pada Dinas Kelautan Dan perikanan Tahun Anggaran 2019	26 Desember 2018 Berlaku
17	384/KEP/2016 Keputusan Gubernur Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi Pada Dinas Kelautan Dan perikanan Tahun Anggaran 2017	22 Desember 2016 Berlaku
18	384/KEP/2012 Keputusan Gubernur Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Kulonprogo tentang retribusi pelayanan Kesehatan Pada Unit pelaksana Teknis Dinas Kelautan perikanan dan Peternakan	3 Desember 2012 Berlaku
19	369/KEP/2015 Keputusan Gubernur Pengangkatan Kuasa pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2016	29 Desember 2015 Berlaku
20	350/KEP/2012 Keputusan Gubernur Perubahan Atas keputusan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 334/KEP/2012 tentang Pengangkatan pejabat pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Pada Dinas Kelautan Dan perikanan tahun Anggaran 2012	22 Oktober 2012 Berlaku
21	346/KEP/2013 Keputusan Gubernur	23 Desember 2013 Berlaku

No.	Produk Hukum	Keterangan
	Pengangkatan Pejabat pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas perikanan dan kelautan Tahun Anggaran 2014	
22	335/KEP/2015 Keputusan Gubernur penetapan Badan ketahanan Pangan dan penyuluhan sebagai Pelaksana program/kegiatan Dekonsentrasi kementerian kelautan dan perikanan republik Indonesia Tahun Anggaran 2016	28 Desember 2015 Berlaku
23	334/KEP/2011 Keputusan Gubernur Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Pada Dinas kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2012	30 Desember 2011 Berlaku
24	317/KEP/2011 Keputusan Gubernur Penetapan Hasil Seleksi Penghargaan adibakti Mina Bahari Bidang perikanan Tangkap Tingkat Propinsi Tahun 2011	21 Desember 2011 Berlaku
25	315/KEP/2015 Keputusan Gubernur Penetapan Dinas kelautan dan perikanan sebagai pelaksana program/kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan kementerian kelautan dan perikanan Republik Indonesia tahun Anggaran 2016	21 Desember 2015 Berlaku
26	296/KEP/2014 Keputusan Gubernur Pengangkatan Kuasa pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada inas Kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2015	2 Desember 2014 Berlaku
27	289/KEP/2017 Keputusan Gubernur Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi Pada Dinas Kelautan Dan perikanan Tahun Anggaran 2018	27 Desember 2017 Berlaku
28	286/KEP/2010 Keputusan Gubernur Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Pada Dinas Kelautan Dan perikanan Provinsi DIY Tahun Anggaran 2011	29 November 2010 Berlaku
29	276/KEP/2009 Keputusan Gubernur Penetapan Pemenang Lomba perikanan Budidaya Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009	28 Desember 2009 Berlaku
30	274/KEP/2011 Keputusan Gubernur Penetapan Penyuluh perikanan teladan Tingkat Provinsi Tahun 2011	16 Nopember 2011 Berlaku
31	268/KEP/2012 Keputusan Gubernur perubahan Kedua Atas keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:267/KEP/2009 tentang penetapan Status Penggunaan barang Milik daerah Kepada Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta	6 Agustus 2012 Berlaku
32	267/KEP/2009 Keputusan Gubernur Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kepada Dinas Kelautan Dan perikanan Provinsi DIY	28 Desember 2009 Berlaku
33	253/KEP/2016 Keputusan Gubernur Persetujuan Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada UPTD Balai Pengembangan Teknologi Kelautan Dan perikanan Dinas Kelautan Dan perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta	18 November 2016 Berlaku

No.	Produk Hukum	Keterangan
34	233/KEP/2017 Keputusan Gubernur Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 384/KEP/2016 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi Pada Dinas Kelautan Dan perikanan Tahun Anggaran 2017	17 November 2017 Berlaku
35	214/KEP/2012 Keputusan Gubernur Penetapan Penyuluh perikanan Teladan Tingkat Provinsi Tahun 2012	10 Juli 2012 Berlaku
36	208.1/KEP/2010 Keputusan Gubernur Penetapan Pemenang ADIBAKTI MINA BAHARI Bidang perikanan Tangkap Tingkat Provinsi DIY Tahun 2010	27 Agustus 2010 Berlaku
37	204/KEP/2011 Keputusan Gubernur Penetapan Dinas Kelautan dan perikanan Sebagai Pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2012	26 Agustus 2011 Berlaku
38	192 Tahun 2004 Keputusan Gubernur Penetapan Perubahan DASK : DPRD, BAPUSDA, BID, DinKANLA, Balai Pengembangan Produktifitas Kerja, Balai Perekaysaan Teknologi perikanan dan Kelautan, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Sermo TA. 2004	30 September 2004 Berlaku
39	175/KEP/2005 Keputusan Gubernur Perubahan Atas Keputusan Gubernur DIY No 80/KEP/2005 tentang Penetapan DASK Dinas Kelautan dan perikanan dan 1 UPTDnya Tahun Anggaran 2005	1 Desember 2005 Berlaku
40	170/KEP/2018 Keputusan Gubernur Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana perikanan Tangkap Tahun 2018	8 Juni 2018 Berlaku
41	168/KEP/2006 Keputusan Gubernur Perubahan Atas Keputusan Gubernur DIY No 92/KEP/2006 tentang Penetapan DASK Dinas perikanan dan Kelautan Provinsi DIY Beserta 1 UPTDnya Tahun Anggaran 2006	13 Nopember 2006 Berlaku
42	166/KEP/2013 Keputusan Gubernur Pembentukan Forum Koordinasi Penaganan Tindak Pidana Bidang kelautan dan perikanan	21 Juni 2013 Berlaku
43	163/KEP/2013 Keputusan Gubernur penetapan penyuluh perikanan teladan Tingkat provinsi Tahun 2013	21 Juni 2013 Berlaku
44	161/KEP/2010 Keputusan Gubernur Pemenang Lomba Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pengolah Hasil perikanan Tingkat Provinsi Tahun 2010	30 Juni 2010 Berlaku
45	157/KEP/2011 Keputusan Gubernur Penetapan Pemenang Lomba Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pengolah Hasil perikanan Tingkat Provinsi Tahun 2011	22 Juli 2011 Berlaku
46	157/KEP/2009 Keputusan Gubernur Penetapan Pemenang Lomba perikanan Budidaya Pada Kelompok Pembudidaya Ikan Nila, Lele, Udang, Unit Pembenihan Rakyat Dan Ikan Hias Tingkat Provinsi DIY Tahun 2008	29 Agustus 2009 Berlaku

No.	Produk Hukum	Keterangan
47	157 TAHUN 2002 Keputusan Gubernur Uraian Tugas dan Tata Kerja UPTD di Lingkungan Dinas perikanan dan Kelautan Prov. DIY	4 November 2002 Berlaku
48	150/KEP/2005 Keputusan Gubernur Penetapan Pemenang Lomba perikanan Tangkap Skala Kecil Pada Kelompok Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI), Kelompok Optimalisasi Pelelangan Ikan (OPTILANPI) dan Kelompok Optimalisasi Pengolahan dan Distribusi (OPTIHANDIS) Tingkat Propinsi DIY Tahun 2005	25 Oktober 2005 Berlaku
49	149/KEP/2017 Keputusan Gubernur Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Balai Pengembangan Teknologi Kelautan Dan perikanan Dinas Kelautan Dan perikanan	2 Agustus 2017 Berlaku
50	149/KEP/2012 Keputusan Gubernur Perubahan atas Keputusan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 334/KEP/2011 tentang Penhangkatan pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Pada Dinas Kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2012	16 April 2012 Berlaku
51	149 Tahun 2004 Keputusan Gubernur Penetapan Dokumen Anggaran satuan Kerja (DASK) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Pengembangan dan Promosi Agribisnis Perbenihan Tanaman Pangan, Balai Diagnostik Kehewan, Balai Rekayasa Teknologi perikanan dan Kelautan, Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru, Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan TA. 2004	31 Juli 2004 Berlaku
52	146.14/KEP/2013 Keputusan Gubernur pengesahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan perikanan Tahun 2012-2017	30 Mei 2013 Berlaku
53	136/KEP/3015 Keputusan Gubernur Penetapan Badan ketahanan pangan dan penyuluhan daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksana Program /Kegiatan dekonsentrasi kementerian Kelautan dan perikanan republik Indonesia tahun Anggaran 2015	136/KEP/2015 15 Juni 2015 Berlaku
54	136/KEP/2015 Keputusan Gubernur Penetapan Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Kelautan Dan perikanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015	15 Juni 2015 Berlaku
55	131/KEP/2012 Keputusan Gubernur Penetapan penghapusan Undang Galah dari daftar barang Pengguna /Kuasa Pengguna Unit kerja Budidaya Air Payau Samas pada Dinas Kelautan dan perikanan tahun Anggaran 2012	28 Maret 2012 Berlaku
56	131 TAHUN 2004 Keputusan Gubernur Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil perikanan (LPPMHP) Pada Dinas perikanan dan Kelautan Propinsi DIY	29 Juni 2004 Berlaku
57	130/KEP/2012 Keputusan Gubernur Persetujuan penghapusan Undang Galah dari daftar barang pengguna/Kuasa pengguna Unit Kerja Budidaya Air Payau Samas Pada Dinas Kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2012	27 Maret 2012 Berlaku
58	130/KEP/2007 Keputusan Gubernur	25 Agustus 2007 Berlaku

No.	Produk Hukum	Keterangan
	Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89/KEP/2007 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Pada Dinas perikanan Dan Kelautan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007	
59	128/KEP/2015 Keputusan Gubernur Penetapan Penyuluh perikanan teladan Tingkat provinsi Tahun 2015	10 Juni 2015 Berlaku
60	123/KEP/2016 Keputusan Gubernur Penetapan Penyuluh perikanan Teladan Tingkat Provinsi Dan Kelompok perikanan Teladan Tingkat Provinsi Tahun 2016	3 Juli 2016 Berlaku
61	123/KEP/2011 Keputusan Gubernur Pembentukan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan perikanan	7 Juni 2011 Berlaku
62	123/KEP/2010 Keputusan Gubernur Perubahan Atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 267/KEP/2009 Tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kepada Dinas Kelautan Dan perikanan Provinsi DIY	15 Mei 2010 Berlaku
63	119/KEP/2019 Keputusan Gubernur Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Dinas Kelautan Dan perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Terkena Bencana Alam Di Kawasan Tempat Pelelangan Ikan Ngrehenan, Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul	10 Mei 2019 Berlaku
64	119/HAK/KPTS/1981 Keputusan Gubernur Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara kepada Dinas Pertanian dan perikanan DIY bertempat tinggal di Yogyakarta selanjutnya disebut pemegang hak pakai-hak pakai atas sebagian tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Kalurahan Pleret, Kemantren P.P/Kecamatan Pleret, Kotamadya/Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta luas 3043 m2	6 Mei 1981 Berlaku
65	118/KEP/2019 Keputusan Gubernur Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan Dan perikanan Tahun 2019	7 Mei 2019 Berlaku
66	118/HAK/KPTS/1981 Keputusan Gubernur Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara kepada Dinas Pertanian dan perikanan DIY bertempat tinggal di Yogyakarta selanjutnya disebut pemegang hak pakai-hak pakai atas sebagian tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Kalurahan Hargobinangun, Kemantren P.P/Kecamatan Pakem, Kotamadya/Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta luas 10.000 m2	6 Mei 1981 Berlaku
67	117/HAK/KPTS/1981 Keputusan Gubernur Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara kepada Dinas Pertanian dan perikanan DIY bertempat tinggal di Yogyakarta selanjutnya disebut pemegang hak pakai-hak pakai atas sebagian tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Kalurahan Sendangsari, Kemantren P.P/Kecamatan Pajangan, Kotamadya/Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta luas 10.098 m2	6 Mei 1981 Berlaku
68	116/HAK/KPTS/1981 Keputusan Gubernur	6 Mei 1981 Berlaku

No.	Produk Hukum	Keterangan
	Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara kepada Dinas Pertanian dan perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta bertempat tinggal di Yogyakarta selanjutnya disebut pemegang hak pakai-hak pakai atas sebagian tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Semanu, Kemantren P.P/Kecamatan Semanu, Kotamadya/Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta luas 10.000 m2	
69	115/HAK/KPTS/1981 Keputusan Gubernur Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara kepada Dinas Pertanian dan perikanan DIY bertempat tinggal di Yogyakarta selanjutnya disebut pemegang hak pakai-hak pakai atas sebagian tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Karangsewu, Kemantren P.P/Kecamatan Galur, Kotamadya/Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta luas 2900 m2	6 Mei 1981 Berlaku
70	114/HAK/KPTS/1981 Keputusan Gubernur Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara kepada Dinas Pertanian dan perikanan DIY bertempat tinggal di Yogyakarta selanjutnya disebut pemegang hak pakai-hak pakai atas sebagian tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Kalurahan Banguncipto, Kemantren P.P/Kecamatan Sentolo, Kotamadya/Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta luas 5500 m2	6 Mei 1981 Berlaku
71	113/HAK/KPTS/1981 Keputusan Gubernur Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara kepada Dinas Pertanian dan perikanan DIY bertempat tinggal di Yogyakarta selanjutnya disebut pemegang hak pakai-hak pakai atas sebagian tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Kalurahan Timbulharjo, Kemantren P.P/Kecamatan Sewon, Kotamadya/Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta luas 5000 m2	6 Mei 1981 Berlaku
72	112/KEP/2005 Keputusan Gubernur Penetapan Pemenang Lomba perikanan Budidaya Pada Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN), Intensifikasi Budidaya (INBUD) Udang, INBUD Nila, Ikan Hias dan Unit Pembenihan rakyat (UPR) Tingkat Propinsi DIY Tahun 2004	23 Juli 2005 Berlaku
73	112/HAK/KPTS/1981 Keputusan Gubernur Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara kepada Dinas Pertanian dan perikanan DIY bertempat tinggal di Yogyakarta selanjutnya disebut pemegang hak pakai-hak pakai atas sebagian tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Pendowoharjo, Kemantren P.P/Kecamatan Sleman, Kotamadya/Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta luas 8500 m2	6 Mei 1981 Berlaku
74	102/KEP/2014 Keputusan Gubernur Perubahan K Atas keputusan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 346/KEP/2013 tentang pengangkatan pejabat pengeola l Kegiatan Dekonsentrasi Pada Dinas kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2014	30 April 2014 Berlaku
75	102/KEP/2013 Keputusan Gubernur Perubahan atas keputusan Gubernur DIY Nomor : 56/KEP/2013 tentang Penetapan Dinas Kelautan dan perikanan sebagai pelaksana Program/kegiatan dekonsentrasi dan Tugas pembantuan kementerian Kelautan dan perikanan RI TA.2013	10 April 2013 Berlaku
76	102/KEP/2010 Keputusan Gubernur	5 Mei 2010 Berlaku

No.	Produk Hukum	Keterangan
	Penetapan Dinas Kelautan Dan perikanan Provinsi DIY Sebagai Pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan Dan perikanan Tahun 2010	
77	92/KEP/2006 Keputusan Gubernur Penetapan DASK Dinas perikanan dan Kelautan Propinsi DIY Beserta 1 UPTDnya Tahun Anggaran 2006	15 Juli 2006 Berlaku
78	89/KEP/2012 Keputusan Gubernur Penetapan Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan perikanan Republik Indonesia tahun Anggaran 2012	23 Pebruari 2012 Berlaku
79	89/KEP/2007 Keputusan Gubernur Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Pada Dinas perikanan Dan Kelautan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007	22 Mei 2007 Berlaku
80	86/KEP/2015 Keputusan Gubernur Penetapan Dinas Kelautan dan perikanan Sebagai pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan kementerian Kalutan dan perikanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015	9 April 2015 Berlaku
81	80/KEP/2005 Keputusan Gubernur Penetapan DASK Dinas perikanan dan Kelautan Beserta UPTDnya se Propinsi DIY Tahun Anggaran 2005	15 Juni 2005 Berlaku
82	77/KEP/2013 Keputusan Gubernur perubahan Atas Keputusan Gubernur DIY No.423/KEP/2012 tentang Pengangkatan pejabat pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Pada Dinas perikanan dan kelautan TA. 2013	15 Maret 2013 Berlaku
83	71/KEP/2011 Keputusan Gubernur Perubahan Atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 286/KEP/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola kegiatan dekonsentrasi pada Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi DIY TA. 2011	23 Maret 2011 Berlaku
84	65/IZ/KPTS/1996 Ijin Gubernur Pemberian ijin pelepasan tanah Kas Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul seluas 8.000 m2 yang akan dipergunakan untuk pembuatan Hatchery Bandeng oleh Dinas perikanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	6 Desember 1996 Berlaku
85	64/IZ/2016 Ijin Gubernur Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Kranggan, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo Memanfaatkan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Depo Showroom Ikan Hias Dengan Sistem Bangun Serah Guna Bekerjasama Dengan Dinas Kelautan perikanan Dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo	23 Desember 2016 Berlaku
86	65/1955 Keputusan Gubernur Mendirikan Rumah Penjaga Kolam perikanan di Kretek	12 Mei 1955 Berlaku
87	61 Tahun 2000 Keputusan Gubernur Penetapan hasil analisis jabatan dinas perikanan Prop. DIY	14 Agustus 2000 Berlaku
88	60/KEP/2013 Keputusan Gubernur	4 Maret 2013 Berlaku

No.	Produk Hukum	Keterangan
	penetapan Badan ketahanan pangan dan penyuluhan , sebagai pelaksana program/Kegiatan dekonsentrasi kementerian kelautan dan perikanan RI TA.2013	
89	57/IZ/2016 Ijin Gubernur Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul Melepaskan Tanah Kas Desa Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Untuk Pembangunan Kantor Balai Penyuluhan Pertanian, perikanan Dan Kehutanan	5 Desember 2016 Berlaku
90	56/KEP/2013 Keputusan Gubernur penetapan Dinas kelautan dan perikanan sebagai pelaksana program/Kegiatan dekonsentrasi dan Tugas pembantuan kementerian kelautan dan perikanan RI TA.2013	4 Maret 2013 Berlaku
91	52/IZ/KPTS/1997 Ijin Gubernur Pemberian ijin pelepasan tanah Kas Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman sebagai pengganti tanah milik penduduk yang terkena perluasan Balai Benih Ikan oleh Dinas perikanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	24 November 1997 Berlaku
92	50/KEP/2014 Keputusan Gubernur penetapan badan Ketahanan Pangan dan penyuluhan, sebagai pelaksana Program/kegiatan dekonsentrasi kementerian Kelautan dan perikanan republik Indonesia Tahun Anggaran 2014	28 Februari 2014 Berlaku
93	50/IZ/2005 Ijin Gubernur Pemberian ijin kepada Pemerintah Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul untuk menyewakan tanah Kas Desa kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Bidang perikanan dan Kelautan	1 Oktober 2005 Berlaku
94	48/KEP/2014 Keputusan Gubernur Penetapan Dinas Kelautan dan perikanan, sebagai pelaksana Program/kegiatan dekonsentrasi dan Tugas pembantuan kementerian Kelautan dan perikanan republik Indonesia Tahun Anggaran 2014	28 Februari 2014 Berlaku
95	47/KEP/2016 Keputusan Gubernur Perubahan Atas keputusan Gubernur daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 369/KEP/2015 tentang pengangkatan Kuasa pengguna Anggaran kegiatan dekonsentrasi pada Dinas kelautan dan perikanan tahun Anggaran 2016	8 Maret 2016 Berlaku
96	69/IDZ/KPTS/1985 Ijin Gubernur Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pembebasan Tanah Kepada Dinas perikanan Prop.DIY Untuk Membebaskan Tanah Kas Desa Kalurahan Jangkaran Kec.Temon Dati II Kulon Progo seluas 3000 m2Izin Menggunakan Tanah Negara seluas 47.000 m2 di Kalurahan Jangkaran Keseluruhannya Untuk Uji Lapang dan Dem Pond Sawak Tambak dlm rangka Pengembangan Budidaya Ikan Udang di DIY	10 juni 1985 Berlaku
97	42/IZ/2001 Ijin Gubernur Pemberian ijin penggunaan 2 (Dua) Unit Ruang Kantor dan Halaman Parkir Balai Benih Ikan (BBI) Dinas perikanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Di Wonocatur kepada PT Adhi Karya (Persero) Cabang nomor V	10 September 2001 Berlaku
98	41/KEP/2011 Keputusan Gubernur	25 Februari 2011 Berlaku

No.	Produk Hukum	Keterangan
	Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur DIY No. : 286/KEP/2010 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi DIY TA. 2011	
99	39 Tahun 2008 Peraturan Gubernur Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan perikanan Mengubah :	12 Desember 2008 Berlaku, Mengubah
100	39/IZ/2004 Ijin Gubernur Pemberian ijin pinjam pakai Balai Benih Induk (BBI) perikanan Krapyak dan Balai Benih Induk (BBI) perikanan Gesikan Kabupaten Bantul beserta Barang Inventaris Lainnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten Bantul	4 September 2004 Berlaku
101	37/SEKDA/X/2017 Keputusan Sekda Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Balai Pengembangan Teknologi Kelautan Dan perikanan Dinas Kelautan Dan perikanan	4 Oktober 2017 Berlaku
102	34/IZ/KPTS/1998 Ijin Gubernur Pemberian ijin kepada Pemerintah Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman untuk melepaskan tanah Kas Desa seluas 48.343 m2 kepada Dunas perikanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pengganti tanah milik penduduk yang terkena Perluasan Balai Benih Ikan Sentral Cangkringan	2 November 1998 Berlaku
103	32/KEP/2012 Keputusan Gubernur Penetapan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sebagai Pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2012	19 Januari 2012 Berlaku
104	31 Tahun 2000 Keputusan Gubernur Uraian Tugas Suba Bagian dan Seksi di lingkungan Dinas perikanan Prop. DIY	10 Mei 2000 Berlaku
105	29/KEP/2006 Keputusan Gubernur Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Pembangunan Pelabuhan perikanan Glagah - Karangwuni Kabupaten Kulonprogo	13 Maret 2006 Berlaku
106	24/KEP/2010 Keputusan Gubernur Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Pada Dinas Kelautan Dan perikanan Provinsi DIY Tahun Anggaran 2010	20 Januari 2010 Berlaku
107	21/IZ/2007 Ijin Gubernur Pemberian Izin pinjam pakai Balai Benih Induk (BBI) perikanan Krapyak dan Balai Benih Induk (BBI) perikanan Gesikan, Kab. Bantul beserta Barang Inventaris lainnya milik Pemporv. DIY kpd Pemkab. Bantul.	No. : 21 21 Mei 2007 Berlaku
108	15/1956 Keputusan Gubernur Pengangkatan sdr.Moestakim Sastrowinoto sebagai Kepala Jawatan Pertanian rakyat/perikanan Darat DIY	31 Agustus 1956 Berlaku
109	20/IZ/2017 Ijin Gubernur	28 September 2017 Berlaku

No.	Produk Hukum	Keterangan
	Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Menyewakan Tanah Desa Palihan Kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Untuk Puskesmas Dan Balai Penyuluhan Pertanian, perikanan, Dan Kehutanan (BP3K)	
110	16/KEP/2009 Keputusan Gubernur Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pada Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi DIY Tahun Anggaran 2009	4 Pebruari 2009 Berlaku
111	15/KEP/2018 Keputusan Gubernur Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 289/KEP/2017 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi Pada Dinas Kelautan Dan perikanan Tahun Anggaran 2018	15 Januari 2018 Berlaku
112	14/KEP/2006 Keputusan Gubernur Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Pada Dinas perikanan dan Kelautan Provinsi DIY Tahun Anggaran 2006	14 Pebruari 2006 Berlaku
113	13/IZ/2012 Ijin Gubernur Pemberian Izin Pinjam Pakai Balai Benih Induk perikanan Gesikan kabupaten bantul Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul	24 Pebruari 2012 Berlaku
114	8/KEP/2008 Keputusan Gubernur Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pada Dinas perikanan Dan Kelautan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2008	19 Januari 2008 Berlaku
115	5.1/KEP/2007 Keputusan Gubernur Penetapan Pemenang Lomba perikanan Budidaya Pada Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) Nila, Lele, Udang Dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006	27 Januari 2007 Berlaku

Catatan:

1. Sumber pencarian produk hukum DIY yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan dapat diperoleh secara lengkap melalui http://birohukum.jogjaprov.go.id/produk_hukum.php?
2. Daftar diatas merupakan hasil kompilasi produk hukum yang diakses pada http://birohukum.jogjaprov.go.id/produk_hukum.php? Pada bulan Juni 2020